

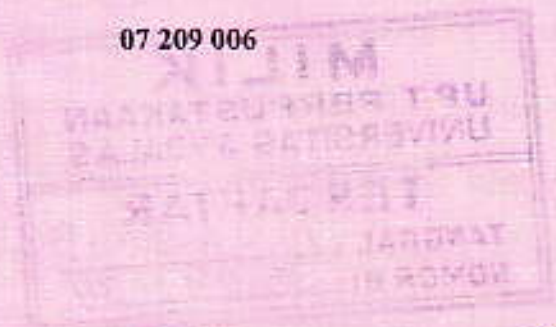
**RUANG TERBUKA UNTUK RESAPAN AIR
DI PERUMAHAN SITEBA KOTA PADANG**

TESIS

Oleh :

RINI MARLINA

07 209 006



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**

RUANG TERBUKA UNTUK RESAPAN AIR DIPERUMAHAN SITEBA KOTA PADANG

Oleh : Rini Marlina

Di bawah bimbingan :
Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS
Prof. Dr. Fashbir M. Noor Siddin, SE, MSP

RINGKASAN

Pembangunan diperkotaan lebih dipandang dari sudut ekonomi tetapi tidak secara ekologi menyebabkan kestabilan ekosistem perkotaan terganggu. Salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan diperkotaan adalah semakin sempitnya lahan sebagai sarana resapan air yang berakibat terjadinya banjir dan penurunan muka air tanah. Hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun yang sangat besar.

Salah satu usaha mempertahankan ketersediaan lahan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota adalah dengan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Dalam peraturan perundang-undangan luasan RTH minimal untuk sebuah kota adalah sebesar 30% untuk menjamin keseimbangan ekosistem perkotaan yang terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Dalam penyediaan dan pengelolaan RTH diperlukan adanya peran serta dari masyarakat dan swasta agar kebutuhan RTH minimal dapat terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah daerah Kota Padang dalam pengadaan RTH didaerah pemukiman dan lingkungan perumahan serta untuk mengetahui bagaimana kondisi ruang terbuka di lingkungan perumahan Siteba dan mengetahui pendapat masyarakat tentang keberadaan ruang terbuka untuk membantu resapan air. Data yang digunakan

terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi tentang aturan normatif menyangkut RTH, sedangkan data primer diperoleh dari hasil survey pada 110 responden yang tinggal di perumahan Siteba.

Perumahan Siteba berada pada kawasan rawan banjir dengan tinggi genangan 0-40 cm. Minimnya RTH menyebabkan aliran air permukaan semakin besar. Saat ini frekuensi banjir sudah berkurang dengan kondisi drainase yang lebih baik dan adanya banjir kanal. Namun hal ini menyebabkan resapan air semakin kecil karena sebagian besar air masuk keselokan terus kesungai dan akhirnya kelaut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengadaan RTH masih lemah karena belum ada aturan ataupun pedoman dari pemerintah daerah untuk pengadaan RTH, baik untuk RTH publik maupun untuk RTH privat. Lemahnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun dilingkungan perumahan. Penggunaan lahan yang seharusnya menjadi RTH publik menjadi sarana umum menunjukkan bahwa pemerintah tidak tegas dalam menjalankan aturan yang dibuat.

Untuk perumahan Siteba sendiri, saat ini hanya tersisa kurang lebih 3% ruang terbuka yang berupa sebuah lapangan bola, jalur hijau disepanjang jalan utama ditambah RTH privat yang masih dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Pemanfaatan lahan privat secara maksimal disebabkan karena keterbatasan lahan dan kebutuhan akan ruangan yang lebih banyak dan lebih luas, sedangkan alih fungsi lahan untuk sarana umum disebabkan karena tuntutan dari masyarakat setempat dan atas seizin dari pemerintah daerah.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang RTH dan sumur resapan sebagai salah satu teknologi untuk mengatasi masalah resapan menyebabkan

ketersediaan RTH tidak menjadi perhatian. Meskipun sebagian besar sudah mengetahui pentingnya RTH tetapi kondisi lahan yang terbatas dan sudah terbentuk menyebabkan penyediaan RTH dan pembuatan sumur resapan tidak dapat dilakukan. Namun demikian masyarakat masih menanam tanaman meskipun hanya dalam pot dengan tujuan untuk keindahan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka pemerintah seharusnya membuat suatu kebijakan untuk pengadaan RTH sebagai acuan bagi masyarakat, baik untuk RTH publik maupun untuk RTH privat. Pemerintah harus lebih tegas dalam pengawasan pembangunan dilapangan agar ketersediaan RTH dilingkungan perumahan dapat tercapai. Perlunya sosialisasi tentang RTH untuk menjaga kestabilan lingkungan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya RTH sehingga masyarakat dapat lebih berperan serta untuk menjaga RTH dilingkungannya masing-masing. Pengenalan teknologi sumur resapan sebagai alternative untuk membantu resapan air untuk lahan terbatas terutama untuk diperumahan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu kota dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan bermacam aktifitas seperti pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan komersial, jasa, bahkan sosial budaya yang mengakibatkan intensitas penggunaan lahan di kota menjadi tinggi, kekuasaan untuk menguasai lahan besar sekali, sehingga kepadatan bangunan menjadi sangat tinggi (Rapuano, 1964; Aswad, 2004).

Perkembangan daerah perkotaan telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Pembangunan lebih dipandang dari sudut ekonomi tetapi tidak secara ekologi menyebabkan terganggunya kestabilan ekosistem perkotaan. Indikasi penurunan kualitas lingkungan ini berupa meningkatnya suhu udara, penurunan muka air tanah, banjir/genangan, intrusi air laut, abrasi pantai, maupun pencemaran air dan udara (Dahlan, 1992).

Terjadinya penurunan atau degradasi kualitas lingkungan adalah akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup, melegalkan upaya perubahan fungsi kawasan yang sebenarnya merupakan kawasan yang harus dilindungi ataupun ruang terbuka hijau (Gunawan, 2004).

Menurut Sunjoto (1988) Pengalihan fungsi lahan merupakan salah satu faktor penyebab banjir dan menurunnya permukaan air tanah dikawasan perumahan. pengalihan lahan hijau menjadi perumahan menyebabkan tidak ada lagi area terbuka sebagai resapan air, sehingga air yang meresap kedalam tanah menjadi kecil dan memperbesar volume aliran air permukaan (*run off*)

Pertumbuhan pemukiman penduduk yang semakin padat didaerah perkotaan telah menggeser fungsi daerah resapan air. Ini adalah fenomena umum yang terjadi didaerah perumahan, diperparah dengan konstruksi bangunan dari beton (bukan rumah panggung) yang semakin memperkecil laju infiltrasi air tanah. Pengembangan rumah merupakan suatu kebutuhan bagi setiap penghuni kawasan perumahan sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga atau untuk kebutuhan lain. Pengembangan rumah atau penambahan jumlah ruangan terjadi hampir disemua lokasi perumahan, rumah-rumah dikembangkan kearah horizontal dengan pertimbangan biaya konstruksi akan lebih murah jika dibandingkan dengan pengembangan kearah vertical. Hal ini menyebabkan garis sempadan bangunan antara 3-4 m dari tepi jalan (Saragih, 1997 ;pusdatapu, 2008) yang semula diperlukan untuk area resapan air dan penghijauan atau taman menjadi tidak ada atau berubah menjadi kedap air, sehingga pada waktu musim hujan volume aliran air permukaan menjadi besar dan volume air yang meresap kedalam tanah menjadi sangat kecil, mengakibatkan genangan air bahkan banjir dan berkurangnya persediaan air tanah pada lokasi perumahan.

Berdasarkan data Kota Padang dalam angka tahun 2006, Kota Padang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat terletak dipesisir pantai Samudera Indonesia dengan luas 694.96 km² yang dilalui oleh 5 sungai besar dan 16 sungai kecil. Dari topografinya, hanya 15.715,44ha dari luas kota padang yang datar (kemiringan 0-8%) sedangkan 12.529,234ha curam (kemiringan 15-40%) dan 38.320.47ha sangat curam (kemiringan >40%). Kota Padang berpenduduk 832.212 jiwa dengan laju pertumbuhan 1.87% per tahun. Seiring dengan penambahan penduduk, jumlah perumahan dari tahun ketahun terus meningkat, berbagai jenis perumahan muncul mulai dari rumah sangat sederhana (RSS), rumah sederhana (RS), KPR BTN dan

rumah mewah baik oleh pemerintah, masyarakat maupun oleh developer. Jumlah IMB yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang dari tahun 2000 sampai 2006 berjumlah 12.067 buah. Saat ini, dengan adanya isu bahaya Tsunami perkembangan daerah pemukiman di kota Padang cenderung bergerak ke arah pinggir kota di bagian timur atau ke daerah yang lebih tinggi. Strategi pengembangan lahan perkotaan Kota Padang menurut RTRW 2004-2013, pengembangan perumahan diarahkan ke daerah Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Nanggalo, Padang Timur dan Padang Utara.

Dalam RTRW Kota Padang 2004-2013 peruntukan lahan untuk pemukiman seluas 9.153 ha atau 13.17% dari total luas Kota Padang. Dilihat dari segi penyebarannya, perumahan dan pemukiman tersebar tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada 5 kecamatan seperti Kecamatan Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, Padang Timur dan Nanggalo. Berdasarkan data profil daerah Kota Padang tahun 2005-2007, sampai bulan Agustus 2007 jumlah rumah yang ada di Kota Padang adalah 148.090 unit. Penyediaan perumahan oleh swasta meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2005 sebanyak 183 unit, tahun 2006 sebanyak 502 unit dan pada tahun 2007 sebanyak 801 unit. Sedangkan perumahan yang dibangun oleh masyarakat juga bertambah, pada tahun 2005 sebanyak 137.469 unit, pada tahun 2006 sebanyak 143.572 unit dan pada tahun 2007 sebanyak 147.289 unit. Salah satu perumahan padat di Kota Padang adalah Perumahan Siteba yang terletak di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo yang terdiri atas 1.400 unit di atas lahan seluas 12.7 ha.

Saat ini kualitas lingkungan Kota Padang sudah menunjukkan penurunan, hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah lingkungan yang mulai terjadi seperti banjir dimusim hujan dan kering dimusim kemarau, penurunan air tanah, penurunan

kualitas dan kuantitas air bersih, intrusi air laut, abrasi pantai dan pencemaran air dan udara. Masalah lingkungan ini juga terjadi di lingkungan pemukiman diantaranya perumahan Siteba yang hampir setiap tahun mengalami genangan bahkan banjir dimusim hujan yang disebabkan karena minimnya ruang terbuka sebagai sarana resapan air akibat rumah yang terlalu rapat dan alih fungsi ruang terbuka menjadi lahan terbangun, bahkan karena seringnya terjadi banjir, masyarakat perumahan tersebut menamai perumahan itu dengan Perumahan Siteba yang berarti siap terima banjir. Dari daftar wilayah rawan banjir di Kota Padang yang dikeluarkan oleh Dinas Kimpraswil Kota Padang (2004), daerah Siteba Raya di Kecamatan Nanggalo termasuk daerah rawan banjir dengan tinggi genangan antara 0-40 cm. Keadaan ini tidak hanya terjadi di perumahan siteba tetapi juga terjadi di perumahan lainnya di Kota Padang.

Kondisi seperti ini menunjukkan perlu adanya ruang terbuka untuk menahan penurunan kualitas lingkungan tersebut, baik itu ruang terbuka publik maupun ruang terbuka privat. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan ekologi lingkungan terutama untuk menjaga ketersediaan air. Ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan di Kota Padang menjadi penting untuk diadakan mengingat pertumbuhan dan perkembangan perumahan serta aktifitas masyarakat yang telah menimbulkan masalah lingkungan. Jika dilihat dari citra satelit Kota Padang, kondisi ruang terbuka di daerah pemukiman di Kota Padang sudah berkurang atau tidak sebanding dengan luasan daerah pemukiman itu sendiri. Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Kota Padang tidak mencantumkan rencana untuk ruang terbuka hijau di daerah pemukiman secara khusus dan hanya merencanakan kawasan untuk konservasi dan kawasan lindung. Walaupun kawasan lindung kota Padang masih cukup tersedia dengan luas 51%, namun kawasan pemukiman kota

Padang terletak dipinggir pantai didaerah yang lebih rendah dari kawasan lindung dan konservasi yang memerlukan ruang terbuka hijau untuk lingkungannya sendiri, karena ruang terbuka hijau mempunyai nilai ekologis untuk keseimbangan alam, yaitu mengurangi dampak negatif akibat kegiatan manusia seperti mengabsorpsi polutan udara, menurunkan suhu, menyerap air hujan dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis telah melakukan penelitian tentang ruang terbuka didaerah pemukiman Kota Padang, studi kasus dilakukan di Perumahan Siteba Kota Padang dengan pertimbangan. *Pertama*, selama ini belum pernah dilakukan penelitian tentang ruang terbuka di Perumahan Siteba. *kedua*, keberadaan RTH yang memadai sangat di perlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

1.2 Perumusan Masalah

Fungsi ekologis merupakan fungsi utama dari RTH disamping fungsi sosial budaya, arsitektur dan ekonomi. Salah satu fungsi ekologis RTH adalah meningkatkan kualitas air tanah dan mencegar banjir . Untuk menjaga kualitas lingkungan sekitarnya diperlukan penyediaan RTH yang memadai dan pengelolaan agar mampu memberikan manfaat secara optimal untuk menjaga kondisi lingkungan terutama didaerah perkotaan. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau diperkotaan terutama di lingkungan pemukiman memerlukan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Untuk keberlanjutan pembangunan dan perbaikan lingkungan diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah daerah untuk pengaturan dan pengadaan ruang terbuka hijau. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk membantu ketersediaan ruang terbuka dilingkungannya masing-

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Padang belum memiliki aturan ataupun perda yang menyangkut RTH, satu-satunya yang dapat dijadikan acuan untuk pengadaan ruang terbuka adalah Perda No. 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan, yang mensyaratkan adanya perbandingan antara luasan pekarangan dengan luasan terbangun dalam suatu bangunan. Masih lemahnya aturan tentang ruang terbuka menyebabkan terjadi pengalihan fungsi lahan oleh masyarakat dengan alasan kebutuhan dan lahan yang terbatas maupun oleh pemerintah dengan alasan untuk kepentingan umum, disamping itu kurangnya pengawasan menyebabkan masyarakat melakukan pengembangan tanpa memperhatikan ketentuan yang ada.
2. Kondisi RTH di Perumahan Siteba sudah sangat minim sekali, hanya tersisa kurang lebih 3% RTH dari luas perumahan tersebut yang terdiri dari sebuah lapangan bola, jalur hijau sepanjang jalan utama dan RTH privat yang masih dimiliki oleh sebagian masyarakat. Berkurangnya RTH karena alih fungsi lahan untuk fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan beberapa mesjid/mushalla. Dan juga karena oleh pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri terhadap lahan masing-masing.
3. Kurangnya informasi menyebabkan minimnya peran serta masyarakat dalam pengadaan RTH dilingkungan pemukiman, terutama untuk RTH privat. Keterbatasan lahan menjadi alasan kurangnya pengadaan RTH dilingkungan

perumahan. Lemahnya penerapan kebijakan dari pemerintah menyebabkan aturan yang dibuat dilanggar dengan alasan untuk kepentingan masyarakat.

4. Masyarakat belum mengenal teknologi sumur resapan yang dapat dijadikan salah satu alternatif untuk membantu resapan air jika lahan tidak mencukupi untuk membuat RTH dilingkungan rumah tinggal. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi pada masyarakat tentang sumur resapan.

5.2. Saran

Dari beberapa hal yang ditemukan dari hasil penelitian ini, dapat disarankan antara lain :

1. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah menyangkut penataan ruang dan pengadaan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan, diharapkan pemerintah daerah segera mengadopsinya dalam bentuk peraturan daerah. Dan diharapkan adanya konsistensi dan ketegasan pemerintah untuk melaksanakan peraturan yang ada. Perlunya pengawasan terhadap penerapan aturan dan kebijakan agar masyarakat tidak berbuat diluar aturan yang telah ada.
2. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar pengetahuan tentang RTH tersebar luas sehingga dalam penerapannya akan lebih mudah. Pemahaman masyarakat akan pentingnya RTH akan sangat membantu pelaksanaannya dilapangan sehingga usaha pemerintah untuk menjaga kebutuhan RTH minimal dikawasan perkotaan dapat tercapai.
3. Adanya pengenalan teknologi sumur resapan untuk membantu resapan air dilingkungan perumahan sebagai salah satu solusi jika lahan terbatas untuk

mengadakan RTH kepada masyarakat, sehingga walaupun lahan terbatas masyarakat masih bisa membantu mengatasi masalah resapan air dilingkungannya dengan membuat sumur resapan, sedangkan untuk penghijauan masyarakat masih bisa menanam tanaman dalam pot. Untuk Perumahan Siteba dimana kondisi RTH sudah sangat sempit, maka penerapan teknologi sumur resapan ini merupakan salah satu solusi yang tepat untuk diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim**, 1990. Perda Tk II Kota Madya Padang Nomor. 6 Tahun 1990. Pemda Kota Padang.
- _____. 2006. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Bangunan Gedung. Pusat Info Data Indonesia. Jakarta.
- _____. 2004. Kerangka Acuan (TOR) Kajian Strategis Penanggulangan Banjir di Kota Padang. Balitbang. Padang.
- _____. 2004. Analisis Kawasan Prioritas Resapan Air Kota. Balitbang. Padang
- _____. 2004. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2004-2013.
- _____. 2006. Padang Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kota Padang.
- _____. 2007. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah perkotaan. Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Pertanian. IPB. Departemen PU.
- _____. 2007. Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. DPU. Jakarta.
- _____. 2007. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- _____. 2007. Undang – undang Penataan Ruang. Fokus Media. Bandung
- Aswad, Al.** 2004. Studi konsep pengembangan penataan ruang terbuka hijau dikawasan pusat kota Pangkalan Bun Kalimantan Timur, Jurnal ASPI Vol. 3, No. 2, April 2004
- BIC Gorontalo.** 2007. Pengelolaan ruang terbuka hijau. www.bic-gorontalo.com. Di down load 29/8/2008.
- BKTRN,** 2001. Panduan Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan. www.bktm.org Down Load tanggal 23 Januari 2009.
- Dahlan, E.** 1992. Hutan Kota Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Jakarta. PT. Enka Parahyangan.
- Geocities.com.** E.Learning Geografi Lingkungan. www.geocities.com Down Load tanggal 23 Januari 2009.
- Hakim, Rustam.** 2000. Analisa Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota DKI Jakarta. Institut Teknologi Bandung.